



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI
PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok,
Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensif
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sutan Syarif Kasim Riau

OLEH:

MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
NIM. 11475104989



PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2019



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
 : 11475104989
 : ADMINISTRASI NEGARA
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
 MELALUI PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan
 Bangkinang)

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Rusdi, S.Sos, MA

NIP.19720906 200720 1 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fadhlul Abrar
 Nim : 11475104989
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara
 Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang)

Hari/Tanggal Ujian : Jum'at / 20 Desember 2019

Disetujui Oleh

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui

Penguji I

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
NIK. 130 712 074

Penguji II

Virna Museliza, SE, M.Si
NIK. 130 712 073



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI
PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok,
Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang)**

OLEH:

MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
NIM. 11475104989

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini menetapkan indikator berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 dengan indikatornya yakni, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada peranan KPUD Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan dan melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai peranan KPUD Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah purposive sampling, Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus dengan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi data kualitatif, kemudian data dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa KPUD Kabupaten Kampar sudah cukup berperan dalam Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dikarenakan tidak semua tugas dilakukan dengan maksimal dan meneluruhkan kepada masyarakat baik Sosialisasi Pemilihan maupun Pendidikan Demokrasi Pemilih itu sendiri. Adapun kendala yang dihadapi dalam Pendidikan Demokrasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ini adalah sikap apatis dan rendahnya minat masyarakat terhadap pemilihan itu sendiri yang disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan baik kepada kandidat pemilihan maupun kepada KPUD itu sendiri.

Kata Kunci: Peranan, Penyelenggaraan Pemerintah, Partisipasi Masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, yang mana berkat rahmat dan karunia Nya sehinggra penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi *suritauladan* bagi seluruh umat islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan untuk itu kepada Allah subhanahu wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orangtua, ayahanda Khaidir, dan ibunda Roaini yang selalu senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya kepada ayunda Elmasthurina dan abang ipar Rahmat Indrajaya, ayunda Raudhatul Mahmudah dan abang ipar Wahyu Candra yang selalu memotifasi dan menguatkan semangat penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara semoga administrasi negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN SUSUKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibuk Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku dosen konsultasi skripsi, konsultasi proposal dan juga pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam membuat skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan seluruh instansi kelembagaan ataupun organisasi yang terlibat dalam penelitian ini.
8. Kepada teman-teman ANA kelas D yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian yang saling memberi semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

Muhammad Fadhlul Abrar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 13

1.3 Tujuan Penelitian 13

1.4 Manfaat Penelitian 14

1.5 Batasan Penelitian 14

1.6 Sistematika Penulisan..... 15

BAB II LANDASAN TEORI 17

2.1 Pengertian Peran..... 17

2.2 Pengertian Komisi Pemilihan Umum..... 19

2.3 Pengertian Demokrasi Pemilih..... 27

2.4 Pengertian Partisipasi Politik 30

2.5 Peran KPU dalam Pendidikan Demokrasi 32

2.6 Pandangan Islam 34

2.7 Penelitian Terdahulu 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Definisi Konsep.....	38
2.9 Konsep Operasional	39
2.10 Kerangka Pemikiran.....	40

BAB III METODE PENELITIAN 42

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Jenis Dan Sumber Data	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Subjek Penelitian.....	44
3.6 Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data.....	45

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 47

4.1 Kabupaten Kampar.....	47
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar.....	47
4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi	48
4.1.3 Pemerintahan.....	51
4.1.4 Visi dan Misi Kabupeten Kampar.....	54
4.1.5 Arti dan Lambang Kabupaten Kampar	58
4.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar	60
4.2.1 Sejarah Berdirinya KPUD Kampar	60
4.2.2 Dasar Hukum	64
4.2.3 Kewenangan.....	65
4.2.4 Visi dan Misi	65
4.2.5 Bagian atau Unit Kerja.....	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	74
--	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79

5.1 Peran KPUD Kampar Dalam Pendidikan Demokrasi.....	79
---	----

5.2 Hambatan KPUD Kampar Dalam Pendidikan Demokrasi	116
---	-----

BAB VI PENUTUP 118

6.1 Kesimpulan	118
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pemilih Pada Pemilu tahun 2014,2017 dan 2018.....	5
Tabel 1.2 Agenda Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.....	8
Tabel 1.3 Persentase Pengguna Hak Pilih.....	10
Tabel 2.1 Konsep Operasional.....	39
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang sering diartikan dalam kedaulatan rakyat memiliki makna yaitu rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahnya itu.

Dalam praktiknya, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayah yang tidak begitu luas saja pun, dikatakan bahwa kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil benar-benar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) dan hal tersebut merupakan ciri penting dari pemerintahan yang demokratis.

Dalam prakteknya di Indonesia, untuk mewujudkan suatu demokrasi pemerintahan atau pemerintahan yang demokratis berkedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam sila keempat pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945” memuat makna kerakyatan diperlukan suatu lembaga yang menampung hak-hak suara rakyat dan menyelenggarakan proses demokrasi, dibentuklah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen).

Kemudian perubahan penting dalam undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang demokratis, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara dalam satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi warga masyarakat untuk mengatur jalannya pemerintahan yang akan datang supaya menjadi lebih baik, masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya melalui hak pilih yang dimilikinya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan dengan tujuan agar suatu pemerintahan berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa itu sendiri. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintahan melalui mekanisme politik.

Akan tetapi, dewasa ini, rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis warga itu sendiri terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, kegiatan komunitas sosial, berolahraga,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertamasya dan lain sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata untuk individu masing-masing warga masyarakat dibandingkan dengan berpartisipasi dalam politik. Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah dengan tingkat pendidikan masyarakat, dimana semakin tinggi pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Inilah yang menjadi ironi di banyak negara berkembang, dimana tingkat pendidikan dan pengetahuan warga masyarakat yang masih rendah, sehingga berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus dituntut profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi untuk mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrument hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu : “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, dengan demikian diperlukan suatu upaya strategis bagi lembaga KPU untuk melakukan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat yang telah disebutkan diatas dalam rangka membangun kesadaran partisipasi politik masyarakat sehingga terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (KPU Kampar) telah menyelenggarakan pemilihan umum seperti Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari data yang peneliti peroleh tentang pemilu dari tahun 2014-2018 ada tiga (3) penyelenggaraan pemilu yaitu pertama; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2014, kedua; Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan Wakil Bupati Kampar pada tahun 2017, dan yang ketiga; Pemilihan Gubernur (PILGUB) pada tahun 2018, pada pemilihan tersebut jumlah pemilih yang ikut berpartisipasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pemilih Pada Pemilu tahun 2014, 2017 dan 2018

No	Jenis Pemilihan	Tahun	Jumlah Pemilih	Persentase jumlah pemilih dari tahun sebelumnya
1	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD	2014	560.928 orang	0 %
2	Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kampar	2017	499.140 orang	Turun 11 %
3	Pemilihan Gubernur (Pilgub)	2018	444.008 orang	Turun 11%

Sumber : KPU Kampar Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan umum di KPU Kampar terdapat jumlah pemilih yang setiap penyelenggaraannya mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD jumlah pemilih yang terdaftar adalah sebanyak 560.928 orang, kemudian di tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kampar jumlah pemilih yang terdaftar mengalammi penurunan 11% adalah sebanyak 499.140 orang, dan pada pemilihan gubernur (pilgub) di tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar juga kembali mengalami penurunan sebanyak 11% dan hanya memiliki pemilih yang terdaftar sebanyak 444.008 orang.

Berdasarkan Penuturan Ketua KPU Kampar, Bapak Ahmad Dahlan, mengatakan, penurunan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 tidak ada kaitannya dengan lima desa bersengketa di perbatasan Kampar dengan Rokan Hulu, kelima Desa tersebut yaitu Rimbo Jaya, Ribo Makmur, Intan Jaya, Muara Intam dan Tanah Datar, tidak ada kaitannya karena pada pemilihan bupati tahun 2017 KPU telah mengkoordinasikannya dengan KPU Rokan Hulu, dan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sudah diadakan pengawasan yang ketat pada kawasan lima desa sengketa tersebut, namun tidak bisa di pungkiri permasalahan tersebut masih tetap ada sampai sekarang, yang pasti pada penginputan jumlah pemilih sampai kami tetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap hanya terdaftar 444.008 orang.

Penurunan yang terjadi tersebut dari pandangan peneliti merupakan sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi, hal tersebut dikarenakan seharusnya setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di suatu daerah mengalami peningkatan akan tetapi situasi yang di alami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (KPU Kampar) berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk itu sendiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan penduduk kabupaten Kampar setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar di komisi pemilihan umum kabupaten kampar (KPU Kampar) setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum itu sendiri yang disebabkan KPU dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat tidak mencapai target yang diinginkan.

Undang-undang nomor 07 Tahun 2017 BAB XVII Pasal 448 Tentang Partisipasi Masyarakat ayat (1) dan (2) berbunyi; ayat (1) "Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat" ayat (2) "Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi pemilu; b. pendidikan politik bagi pemilih; c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan d. penghitungan cepat hasil pemilu. Selanjutnya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 ayat (1) angka 22 dan 25 menyebutkan bahwa 22. "Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu". 25. "Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu".

Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 di tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dibantu oleh 4 (empat) orang anggota Komisionernya membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertugas melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan, jumlah PPK dari tiap Kecamatan-nya ada 5 (lima) orang per 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, kemudian KPU juga membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melaksanakan tugas Pemilu di tingkat kelurahan/desa, jumlah PPS dari tiap desa/kelurahan ada 3 (tiga) orang per 250 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar, dari PPS tersebut terbentuklah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjalankan tugas melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), jumlah KPPS dari tiap desa/kelurahan ada 7 (tujuh) orang ditambah 2 (dua) orang petugas ketertiban tiap TPS yang berjumlah 1.318 TPS se-Kabupaten Kampar, yang keseluruhan dari penyelenggara tersebut berperan penting dalam terlaksananya Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar itu sendiri. Koordinasi tugas dimulai dari KPU Kabupaten Kampar yang melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPK setiap Kecamatan, kemudian PPK yang telah mendapatkan Bimtek tersebut mensosialisasikan materi pemilu kepada PPS di kecamatan-nya masing-masing yang selanjutnya PPS yang telah mendapatkan materi sosialisasi pemilu melaksanakannya bersama KPPS yang telah di bentuk di Desa/Kelurahan-nya masing-masing.

Kemudian Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (KPU Kampar) telah melakukan berbagai macam agenda kegiatan sosialisai dan pendidikan pemilih, yaitu terdapat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 1.2 Agenda kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kampar dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

Nama Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa/i SMA sederajat di wilayah bangkinang dan sekitarnya - Mahasiswa/i Universitas Pahlawan, STIE Bangkinang, dan Politeknik Kampar
Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan dan Basis Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Guru TK Paud selingkungan Bangkinag dan sekitarnya - Ibu - ibu PKK Wilayah Kampar - Pemilih Perempuan Wirit Pengajian Ibu-Ibu di Kampar Utara
Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten Kampar
KPU Goes To School	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa SMK 1 Tapung sebagai pemilih pemula - Siswa SMAN 3 Siak Hulu sebagai Pemilih Pemula - Siswa SMAN 1 Kampar Kiri - SMAN 1 Tapung Hulu
KPU Goes To Campus	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa/i Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa - Mahasiswa/i Politeknik Kampar
KPU Road Show	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Ke Pasar Raya Bangkinang - Sosialisasi Ke Pasar Kuok - Sosialisasi Ke Pasar Baru Air Tiris - Sosialisasi Ke Pasar Raya Tapung - Sosialisasi Ke Pasar Kampa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Media Sosial KPU	- Sosialisasi untuk warga internet (netizen) melalui media sosial
Rumah Pemilu KPU	- Pendidikan bagi warga masyarakat yang belum mengenal tentang pemilihan umum
Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018	- Partai politik - Pemilih Muda - LSM - Tokoh Masyarakat - Tokoh Agama - Media Massa

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019

Tabel 1.2 memuat berbagai macam kegiatan atau agenda sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, adapun agenda yang dilakukan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan timbulnya kesadaran politik warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan hadir pada saat pemilihan itu sendiri yakni pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018. Dari berbagai macam agenda kegiatan sosialisasi tersebut penulis menganalisa bahwasanya agenda Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak seperti yang diharapkan pasalnya dari berbagai macam agenda yang dilakukan hanyalah tertuju kepada aspek umum masyarakat saja, sehingga aspek yang lebih spesifik seperti masyarakat daerah-daerah perbatasan ataupun daerah yang sulit di jangkau belum mendapatkan sosialisasi ataupun pengetahuan yang memadai dalam proses dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, memang benar agenda Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih telah terlaksana oleh KPU Kampar akan tetapi dengan penuh kerendahan hati penulis mengatakan bahwa agenda Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar hanyalah sebatas Formalitas semata, hal tersebut dapat dibuktikan dari data persentase tingkat partisipasi masyarakat yang peneliti dapatkan dari KPU itu sendiri yang hanya sebesar 57,77 % saja.

Anggaran dana yang telah digunakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Provinsi Riau pada tahun 2018 secara keseluruhan menurut penuturan dari bapak Yatarullah, S.Ag, SH, M.Hum, selaku ketua KPU Kabupaten Kampar adalah sebesar ±24M, dari anggaran dana tersebut setengahnya dipergunakan untuk honorium petugas pelaksana pemilu KPU, PPK, PPS dan KPPS dan lainnya, kemudian setengahnya lagi dipergunakan untuk sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dari penjabaran tersebut penulis menganalisis bahwasanya biaya anggaran untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih di kabupaten kampar telah cukup untuk menunjang dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum itu sendiri.

Akan tetapi pada realisasi yang terjadi ketika proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan target yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tergoong rendah dan menurun dari pemilihan yang sebelumnya dan dibawah target pencapaian yang diinginkan, dan tentunya ini menjadi pertanyaan bagi berbagai kalangan termasuk bagi peneliti sendiri. Penurunan tersebut dengan persentase pengguna hak pilih dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3 Persentase Pengguna Hak Pilih warga masyarakat Kabupaten Kampar pada Agenda Pemilihan Umum KPU Kampar Tahun 2014, 2017 dan 2018

Tahun / Jenis Pemilihan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Memilih	Persentase
2014 / Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden RI	560.928	365.047	195.881	65,08 %
2017 / Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kampar	499.140	327.248	171.892	65,56 %
2018 / Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau	444.008	256.527	187.481	57,77 %

Sumber : KPU Kampar Tahun 2019 / infopemilu.kpu.go.id (diakses pada 20-01-2019 pukul 12:47)

Tabel 1.3 Tentang tingkat Persentase Pengguna Hak Pilih disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kampar masih rendah dan menurut setiap tahunnya yaitu dari 65,08% pada tahun 2014, turun menjadi 57,77% pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (KPU Kampar) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan belum mampu sepenuhnya menjalankan visi dan misi dari KPU yang terkandung ke dalam Asas, Prinsip dan Tujuan KPU itu sendiri. Selanjutnya dari berbagai macam kegiatan Sosialisai dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Kampar dalam upaya menimbulkan kesadaran politik warga masyarakat sehingga meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 tersebut dinilai masih kurang efektif menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang berlandaskan asas, fungsi, dan tujuan KPU itu sendiri. Selain dari pada itu, peneliti menilai bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (KPU Kampar) tidak maksimal dalam upaya dan strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu itu sendiri yang dilakukan dengan banyaknya agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih serta anggaran dana dan fasilitas yang memadai akan tetapi tersebut telah nampak dari persentase tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yaitu hanya 57,77% dengan jumlah pengguna hak pilih 265.527 orang dari total keseluruhan daftar pemilih 444.008 orang.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan dari latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan menjelaskan secara detail tentang bagaimana “ **Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada topik penelitian dan permasalahan yang diterangkan diatas, maka tujuan yang hendak di capai pada penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai informasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri khususnya dalam hal Pendidikan Pemilih.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dalam konteks permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian tepat pada sasaran dan terarah pada tujuan yang diinginkan dengan tepat dan benar maka penulis membatasi penelitian ini pada Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Pemilih di Kabupaten Kampar. Karena keterbatasan penulis baik dari segi pemikiran, tenaga, dana maupun waktu dan jarak penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang di tulis oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan ke dalam beberapa bab-bab yang mana terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematikan penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisikan tentang definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian - kajian terdahulu, pandangan islam terhadap penelitian, kerangka pemikiran/ konsep operasional/ definisi konsep/ variabel penelitian/ hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, subjek penelitian, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum dari tempat lokasi penelitian, yang meliputi keadaan keseluruhan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar; Profil KPU Kampar, sejarah KPU Kampar, Visi-misi KPU kampar, struktur organisasi, uraian tugas dan lainnya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

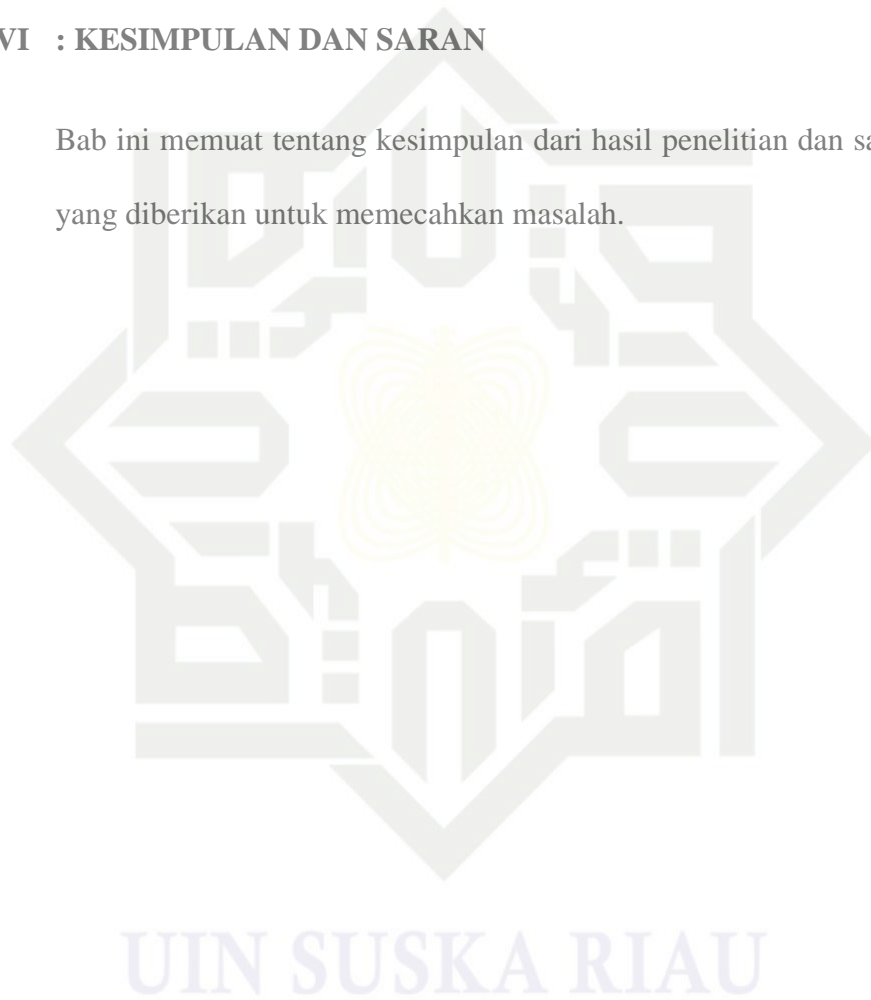
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan tentang hasil pelaksanaan Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk memecahkan masalah.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran

Peranan menurut Soekanto (2002: 268) adalah “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”

Menurut Soekanto (2002: 269) mencakup sedikit tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. (Veithzal Rivai: 2004: 148). Setiap peranan memiliki tujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan tersebut, terdapat hubungan yang tersangkut, atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, misalnya nilai ekonomis yang tercipta dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan.

Soerjono Soekanto (2002:246) dalam bukunya menyebutkan bahwasannya pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia sendiri menurut Soerjono Soekanto (2002:246), terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan, gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme.

Serta Soerjono Soekanto (2002:247), menyebutkan di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari, bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peran. Tidak jarang terjadi bahwa di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan, sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak hanya mempunyai hak saja sedang pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu tanggungjawab yang dimiliki seseorang individu, kelompok ataupun suatu instansi/organisasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan untuk mencapai suatu target atau pencapaian yang diinginkan.

2.2 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggaraan Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pengertiannya sebagai berikut :

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilu adalah pelaksanaan terhadap Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Berdasarkan pengertian diatas Komisi Pemilihan Umum merupakan Suatu lembaga yang menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Adapun Visi, Misi, Tugas dan Kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggaraan Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipasif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara Kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tugas dan Kewenangan KPU :

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kekuatan Pemilihan Umum.

Selanjutnya Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota yaitu

KPU Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU

Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Jumlah Anggotanya sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Tugas KPU Kabupaten / Kota

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten/ Kota

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten/kota
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih sedara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

2.3 Pengertian Pendidikan Pemilih

Pasal 31 UUD 1945; Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi landasan dari Pendidikan Pemilih, penjelasan mengenai pasal 31 UUD 1945 tersebut berbunyi, Ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat (2): pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat (2) tersebut menjadi landasan pendidikan informal di luar sekolah yaitu bisa dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintahan termasuk ke dalamnya yaitu Komisi Pemilihan Umum. Salah satu bentuk Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Pendidikan Politik Bagi Pemilih.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018, Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu, Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi :

- a. Keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemilih Pemula;
- c. Pemilih Muda;
- d. Pemilih Perempuan;
- e. Pemilih Penyandang Disabilitas;
- f. Pemilih Berkebutuhan Khusus;
- g. Kaum Marjinal;
- h. Komunitas;
- i. Keagamaan;
- j. Relawan Demokrasi; dan/atau
- k. Warga Internet (*netizen*)

Selanjutnya Pendidikan Pemilih dapat dilakukan dengan cara dan metode melalui beberapa bentuk yaitu sebagai berikut :

- a. Kelompok Sosial;
- b. Pemanfaatan Jejaring Sosial;
- c. Media Lokal atau Tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi;
- f. Pembentukan Agen dan Relawan Demokrasi; dan/atau
- g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

Kemudian dalam melakukan pendidikan Pemilih tersebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan :

- a. Kelompok atau Organisasi Kemasyarakatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Komunitas Masyarakat;
- c. Organisasi Keagamaan;
- d. Kelompok Adat;
- e. Lembaga Pendidikan;
- f. Instansi Pemerintah;
- g. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau
- h. Media Massa Cetak dan Elektronik

Kerja sama tersebut di atas dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiharjo (2008 : 397) dalam dasar-dasar ilmu politik; Partisipasi Politik Merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.

Partisi politik masyarakat dalam pemilu merupakan wujud dari demokrasi. Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan. Wujud dari partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilu, diantaranya adalah mengikuti kampanye politik, memberikan suara (mencontreng), dan menjadi panitia pemilihan pada pemilu legislative.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengakui dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas tiga bagian, yaitu:

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kemudian terdapat masyarakat yang menganggap telah terjadi penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah :

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu :

1. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
3. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
4. Partisipasi politik militan radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

Keseluruhan jenis-jenis partisipasi tersebut telah berlaku dan benar adanya terjadi di lingkungan sosial masyarakat pada saat sekarang ini

2.5 Peran KPU dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui pendidikan pemilih.

Peran KPU dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Politik dapat dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diembannya, Baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan Pendidikan Pemilih tersebut kepada masyarakat. Pendidikan Pemilih disini tidak hanya sebagai Pendidikan yang hanya memberikan Pengetahuan tentang Pelaksanaan Pemilihan saja, akan tetapi Pendidikan Pemilih haruslah memberikan Pemahaman dan Penjelasan tentang pentingnya suatu Pemilihan Umum bagi masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran diri masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilihan itu sendiri.

Undang - undang yang berlaku dan mengatur tentang Pendidikan Pemilih ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 434, pasal 448 ayat (2), pasal 450 Tentang Pemilihan Umum. dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keseluruhan dari Undang-undang dan Peraturan tersebut mengatur Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan Tugan dan Wewenangnya tentang Pendidikan Pemilih.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) dalam melaksanakan Pemilu bertanggung jawab terhadap terlaksananya setiap tahapan-tahapan pemilihan umum dan harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperbanyak kegiatan pendidikan memilih ke seluruh aspek lingkungan masyarakat.

Pendidikan Memilih penting untuk dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan pemilihan selalu berubah ubah dan berkembang, yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, sehingga warga masyarakat yang pada awalnya tidak mengetahui menjadi mengetahui dan timbul kesadarannya untuk ikut turut berpartisipasi dalam pemilihan umum itu sendiri.

2.6 Pandangan Islam Tentang Pendidikan Memilih dan Partisipasi Politik

Pendidikan Memilih dan Partisipasi politik dalam sudut pandang islam terdapat dalam firman Allah SWT

QS An-Nisa' 4 : [58]

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

QS Al-Jathiyah 45 : [18]

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

18. “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Jika dikaitkan dengan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Politik maka dapat diartikan bahwasanya memiliki tanggungjawab menyampaikan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum diuntut agar menjalankan semua aturan yang berlaku dalam pemerintahan, dan bagi masyarakat juga diperintahkan agar senantiasa ikut berpartisipasi dalam urusan pemerintah yaitu ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan serangkaian penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang masalah dan objek permasalahan yang sama, adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

- a. **M Nur Faizan. 2016, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun dalam Mengurangi Angka Golongan Putih (GOLPUT) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 DI Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Karimun, Hasil dari**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Mengurangi angka Golput yang dilakukan melalui Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dinilai belum maksimal, **Perbedaan** penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti keseluruhan usaha Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dan mengurangi angka Golput dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2016 dan juga pada tempat dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kabupaten Karimun, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menitik-beratkan pada usaha komisi pemilihan umum melakukan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018, dan dilakukan pada tahun 2019 di tempat dan lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Kampar

- b. **Anuar Paruhuman. 2017, “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2013 (Studi Kasus Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)”**, Hasil dari penelitian yaitu minimnya sosialisasi pemerintah atau KPU dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 kemudian substansi ide dalam partisipasi masyarakat kurang tepat dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 tersebut, **Perbedaan** penelitian ini adalah Pada penelitian tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan-nya dilakukan dengan Sosialisai Masyarakat pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Kabupaten Bengkalis, sedangkan pada penelitian ini upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan cara Pendidikan Pemilih pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 di Kabupaten Kampar.

- c. **Fajri Suganda. 2017, “Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”, Hasil** dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses sosialisasi yang berjalan tidak merata dan kinerja PPK yang belum maksimal untuk menyebarluaskan informasi sosialisasi dari KPUD Kota Pekanbaru, kemudian hambatan sosialisasi KPUD kota Pekanbaru disebabkan masih banyaknya masyarakat yang Golput, DPT ganda, pemilih pemula yang sedikit tingkat pertisipasinya, **Perbedaan** penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih mengutamakan aspek sosialisasi dari pada aspek pendidikan pemilih yang di lakukan pada tahun 2017 di KPU Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini peneliti menfokuskan pada upaya dan Metode Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum dalam usahanya meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga dilakukan pada tahun 2019 di KPU Kampar.

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peran adalah suatu tanggungjawab yang dimiliki seseorang individu, kelompok ataupun suatu instansi/organisasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan untuk mencapai suatu target atau pencapaian yang diinginkan.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
3. Pendidikan Pemilih
Pendidikan Pemilih merupakan sebagian upaya untuk menumbuhkan serta mengembangkan pengetahuan, sikap serta keterampilan demokratis. Dimana upaya tersebut mempunyai tujuan yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan baik formal, nonformal maupun informal.
4. Partisipasi Politik merupakan kegiatan seseorang dalam ber-politik. kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam

proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan.

2.9 Konsep Operasional

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang Variabel, Indikator dan Sub-indikator dari konsep yang digunakan peneliti pada penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pendidikan Pemilih	1. Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan informasi mengenai tahapan proses penyelenggaraan pemilu kepada warga masyarakat melalui Road Show. - penyampaian informasi tentang jadwal penyelenggaraan pemilihan melalui media cetak maupun elektronik. - dan memberikan pemahaman tentang program pemilu kepada masyarakat.
	2. Pendidikan Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan, pemahaman pemilih melalui pendidikan, pelatihan ataupun bimbingan teknis (bimtek) kepada PPK, PPS, KPPS, Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat, masyarakat umum. - memberikan materi untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pemilu kepada basis-basis pemilih yaitu, antara lain: Pemilih Pemula, Muda, Keluarga, Perempuan, Keagamaan, Komunitas, kaum marjinal, Penyandang disabilitas, berkebutuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

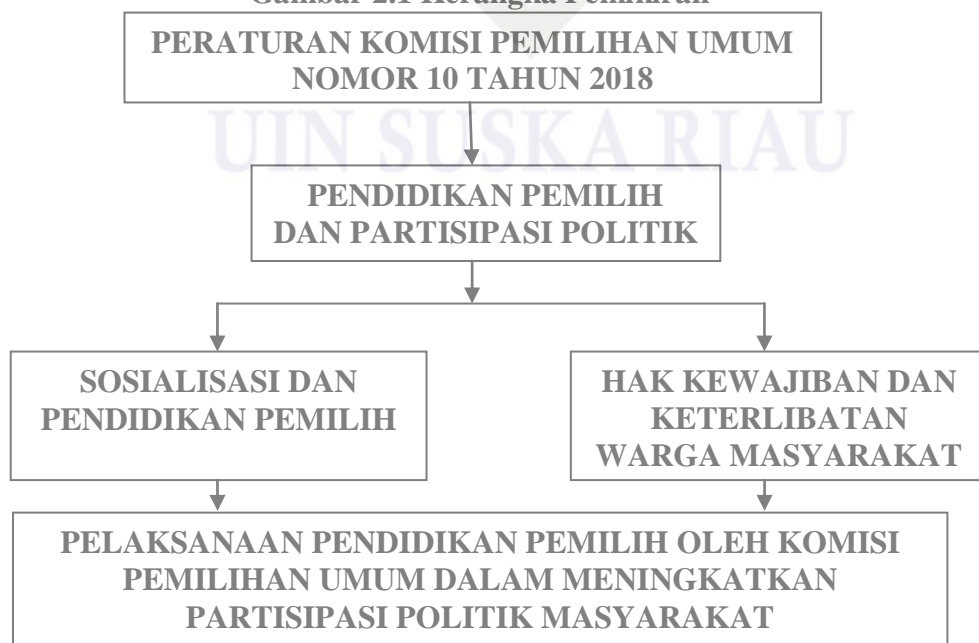
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi Politik Masyarakat	1. Hak dan Kewajiban warga masyarakat	<p>husus, warga internet (netizen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - memperoleh informasi publik terkait dengan pemilu. - ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan KPU terkait pemilu. - ikut serta dalam setiap tahapan pemilu. - menjaga pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
	2. Keterlibatan Warga Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, Seperti menjadi anggota penyelenggara pemilihan. - keterlibatan dalam tahapan pemilu seperti ikut dalam penyelenggaraan pemilu, ikut mencoblos, ikut dalam kampanye politik dan lain sebagainya. - keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu, seperti ikut dalam rapat pleno keputusan hasil perolehan suara pemilu.

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiono 2011 : 11). Suatu penelitian yang berusaha menjawab bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018” maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Kampar, dalam hal ini instansi atau lembaga yang terkait dalam penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, selanjutnya waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 yang penelitiannya dilakukan pada bulan Februari sampai April tahun 2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Koentjaraningrat dalam (Zulganef: 2013: 159) data merupakan sebagai catatan-catatan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil wawancara pengamatan, catatan mengenai perhitungan-perhitungan jumlah dan frekuensi Kegiatan-Kegiatan Sosial, Catatan Mengenai Pengukuran-Pengukuran Bidang, volume, dan intensitas benda dan aktifitas kebudayaan, catatan-catatan kutipan dari bahan dokumen dan surat kabar.

a. Data primer

Sumber data primer (Sugiyono: 2011: 156) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini didapat dari *key informan*, maupun informasi dari objek yang diteliti dalam penelitian ini. *Key informan* yang dianggap mampu memberikan informasi yang perlu dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Komisi 1 (satu), Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar dan beberapa orang tokoh yang dianggap perlu.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder (Sugiyono: 2011: 156) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah arsip dan dokumen persentase pengguna hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suara pada hasil pemilihan umum serta catatan-catatan maupun data-data lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen penilaian terhadap kinerja dan peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, berdasarkan wawancara peneliti memberikan pertanyaan yang kemudian responden memberikan jawaban dan kriteria penilaian kinerja KPU tersebut, skala penilainya tersebut adalah:

Sangat Terlaksana (ST)	: 100
Terlaksana (T)	: 75 - 99
Cukup Terlaksana (CT)	: 50 - 74
Kurang Terlaksana (KT)	: 25 - 49
Tidak Terlaksana (TT)	: 0 - 24

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Usman (2009: 52) mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis melakukan observasi langsung dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan, alat pengumpulan datanya disebut observasi.

b. Wawancara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan *key informan*, secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Kepala, Komisioner, Kasubag dan orang-orang tertentu terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

c. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumen yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan di lapangan

3.5 Subjek Penelitian

Menurut Moleong (2000: 97) informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Informan tersebut bisa berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini, penulis tentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono: 2011: 96). Dengan menggunakan *purposive*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Kriteria informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar	1
2.	Sekretaris Umum KPU Kabupaten Kampar	1
3.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar	1
4.	Ketua DPRD Kabupaten Kampar	1
5.	Ketua Partai Politik (PKS, Nasdem, Golkar)	3
6.	PPK Kecamatan Kuok, Bangkinang, dan Salo	3
7.	Masyarakat yang menggunakan hak pilih di 3 kecamatan	5
8.	Masyarakat yang tidak Menggunakan Hak Pilih di 3 kecamatan	5
Jumlah		20

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2012: 247). Pada tahap ini peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilah informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Mahmud Shah dari Melaka, Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja. Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	Bangkinang Kota	2	2	4
2	Bangkinang	2	7	9
3	Kuok	-	9	9
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar	1	17	18
6	Kampar Kiri	1	19	20
7	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
8	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
9	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
10	Kampar Timur	-	9	9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11	Kampar Utara	-	8	8
12	Perhentian Raja	-	5	5
13	Rumbio Jaya	-	7	7
14	Salo	-	6	6
15	Siak Hulu	-	12	12
16	Tambang	-	17	17
17	Tapung	-	25	25
18	Tapung Hilir	-	16	16
19	Tapung Hulu	-	14	14
20	XIII Koto Kampar	1	12	13
21	Koto Kampar Hulu	-	6	6
JUMLAH		8	242	250

Sumber : KPU Kampar Tahun 2019

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11 289,28 km². Kecamatan Tapung mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 1 365,97 km² atau sekitar 12,1 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 76,92 km² atau sekitar 0,7 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Secara administratif Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Tabel 4.2 Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Kampar

NO	KECAMATAN	LUAS (KM2)	PERSENTASE (%)
1	Bangkinang Kota	177,18	1,60
2	Bangkinang	253,50	2,20
3	Kuok	151,41	1,30
4	Gunung Sahilan	597,97	5,30
5	Kampar	136,28	1,20
6	Kampar Kiri	915,33	8,11
7	Kampar Kiri Hilir	759,74	6,73
8	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11,53
9	Kampar Kiri Tengah	330,59	2,90
10	Kampar Timur	173,08	1,50
11	Kampar Utara	79,84	0,70
12	Perhentian Raja	111,54	1,00
13	Rumbio Jaya	76,92	0,71
14	Salo	207,83	1,80
15	Siak Hulu	689,80	6,11
16	Tambang	371,94	3,29
17	Tapung	1.365,97	12,10
18	Tapung Hilir	1.013,56	9,00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

19	Tapung Hulu	1.169,15	10,36
20	XIII Koto Kampar	731,69	6,48
21	Koto Kampar Hulu	674,71	5,98
		11.289,28	100 %

Sumber : www.kamparkab.go.id (diakses pada 03/04/2019 pukul 13:17)

4.1.3 Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinasi Kabupaten.

Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Bupati H. Azis Zaenal, SH, MM dan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto, SH, yang ditetapkan oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan mulai 22 Mei 2017 sampai sekarang, adapun Nama-nama Bupati yang pernah menduduki Kepemimpinan di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Nama dan Masa Jabatan Bupati Kampar

No	Nama Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Periode
1	Datuk Wan Abdul Rahman	01 Januari 1950	April 1954	1
2	Ali Lubis	April 1954	September 1958	2
3	Abd. Muis Datuk Rangkayo Maharajo	Maret 1958	September 1958	3
(1)	Datuk Wan Abdul Rahman	September 1958	Oktober 1959	4
4	Datuk Harunsyah	02 Januari 1960	11 Februari 1965	5
5	T. Muhammad	11 November 1965	17 Mei 1967	6
6	R. Soebrantas Siswanto	18 Mei 1967	18 Mei 1971	7
		18 Mei 1972	18 Mei 1974	8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		18 Mei 1974	18 September 1978	9
7	A. Makahamid	07 September 1978	14 Februari 1979	10
8	Sartono Hadisumarto	14 Februari 1979	14 Februari 1984	11
9	Syarifuddin	28 Mei 1984	April 1986	12
10	H.Saleh Djasit, SH	April 1986	25 Maret 1991	13
		25 Maret 1991	3 April 1996	14
11	H. M. Azaly Djohan, SH	03 April 1996	4 November 1996	15
12	Drs. Beng Sabil	04 November 1996	5 April 2001	16
	Drs. H. Syawir Hamid	05 April 2001	23 November 2001	
13	H. Jefry Noer	23 November 2001	25 Maret 2004	17
	H. Rusli Zainal	25 Maret 2004	23 September 2005	
(13)	H. Jefry Noer	23 September 2005	23 November 2008	
	Drs. Marjohan Yusuf	23 November 2006	11 Desember 2006	
14	Drs.H.Burhanuddin	11 Desember	11 Desember	18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Husin, MM	2006	2011	
(13)	H. Jefry Noer	11 Desember 2011	11 Desember 2016	19
	Syahrial Abdi, AP, M.Si	11 Desember 2016	22 Mei 2017	
15	H. Azis Zaenal, SH, MM	22 Mei 2017	12 Februari 2019	20
	Catur Sugeng Susanto, SH	12 Februari 2019	Sekarang	

Sumber : www.kamparkab.go.id (diakses pada 03/04/2019 pukul 13:17)

4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. VISI PEMBANGUNAN RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005 - 2025

"Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, dalam Lingkungan Masyarakat Agamis tahun 2025" Adapun penjelasan makna yang terkandung dalam Visi diatas adalah:

1. Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pada pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlukan secara adil.
3. Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang Agamis, dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, sesuai dengan motto masyarakat Kampar untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Serambi Mekah Provinsi Riau.

b. MISI PEMBANGUNAN RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005 – 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka misi pembangunan yang harus dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah adan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan ke depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.

c. VISI PEMBANGUNAN RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2022

"Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera", Adapun penjelasan makna yang terkandung dalam Visi diatas adalah:

1. Wilayah industri yang maju, adalah Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sektor industri yang meningkat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Termasuk didalam sektor industri ini adalah industri pariwisata.
2. Wilayah pertanian yang maju, adalah Kabupaten Kampar dengan produk pertanian yang berkualitas, produktivitas tinggi, dan petani yang sejahtera. Saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Kampar memang menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Dengan memajukan sektor pertanian berarti mengangkat taraf ekonomi sebagian besar masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat yang religius, adalah masyarakat Kabupaten Kampar yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis.
4. Masyarakat yang beradat dan berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Kampar yang memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya lokal sehingga dapat menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sekaligus penciri dan identitas daerah. Adat dan budaya yang mengandung kearifan tradisional ini menjadi tata nilai yang mengatur masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga warisan leluhur yang agung ini dapat senantiasa dipraktekkan dan dilestarikan.
5. Masyarakat yang sejahtera, adalah masyarakat Kabupaten Kampar yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang paling manusiawi. Kebutuhan hidup ini merentang mulai dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan dan papan. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sehingga cita-cita akan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangun daerah dapat terwujud di akhir periode perencanaan.

d. MISI PEMBANGUNAN RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.1.5 Arti dan Lambang Kabupaten Kampar



Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Kampar

Lambang Kabupaten Kampar terbagi atas 9 bagian, yaitu :

1. Empat petak dalam perisai
2. Tiga garis putih di tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bintang lima dengan dua tangkai padi
4. Rusa
5. Menara sumur
6. Dua buah gerobak lori
7. Empat puncak benteng
8. Pohon karet
9. Peta kabupaten Kampar

Adapun arti dari Lambang tersebut adalah :

1. BENTENG DAN PERISAI adalah melambangkan kekuatan dan kekebalan rakyat dalam berjuang dan membangun
2. BATU BERSUSUN adalah melambangkan persatuan Nasional yang kuat, kokoh, serta menimbulkan inspirasi membangun
3. TUJUH BELAS BUAH BATU BERSUSUN adalah menunjukkan tanggal tujuh belas hari proklamasi
4. DELAPAN BUAH BATU BATA adalah menunjukkan bulan delapan (bulan Agustus)
5. EMPAT DAN LIMA buah dibawah menunjukkan tahun 45 (1945)
6. SATU PINTU GERBANG adalah melambangkan pintu kemakmuran
7. BINTANG BERSUDUT LIMA adalah melambangkan Pancasila
8. POHON KARET adalah melambangkan sumber dari kemakmuran rakyat
9. TUJUH BELAS BUTIR PADI dalam setangkai dan LIMA CABANG POHON KARET adalah melambangkan bahwa negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. EMPAT BUAH PUNCAK BENTENG adalah melambangkan adat istiadat yang menjiwai prikehidupan rakyat
11. RUSA adalah melambangkan sifat-sifat ketangkasan, kecakapan, kelincahan dan keuletan
12. PETA KABUPATEN KAMPAR menyatakan daerah kabupaten kampar
13. MENARA MINYAK DAN TANGKI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan gas bumi
14. SATU LORENS dengan DUA GEROBAK LORI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan bahan-bahan logam.

4.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar (KPUD KAMPAR)

4.2.1 Sejarah Berdirinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

Sejarah KPU Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapansumpah/janji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

4.2.2 Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Kewenangan

Wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

4.2.4 Visi dan Misi

Visi

"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas"

Misi

1. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas;
2. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses;
3. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
4. Mengelola Data Pemilu yang Akurat, Menyeluruh, Bersikenambungan dan Mutakhir untuk pelayanan dan Manajemen Pemilu;
5. Menyusun Regulasi yang memberikan Kepastian Hukum, Progresif dan Partisipatif;
6. Melayani Hak Pemilih Serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih;
7. Melayani Peserta Pemilu secara Adil; dan
8. Membangun Kerjasama yang Memperkuat Pelaksana Tugas KPU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4.2.5 Bagian atau Unit Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (KPU KAMPAR) terdiri dari 5 orang Komisioner dan 1 sekretaris yang dibawahnya terdapat 4 Kepala Sub Bagian yaitu : Kasubag Keuangan Umum dan Logistik; Kasubag Hukum; Divisi Teknis dan Hubmas; Kasubag Program dan Data, yang di bantu oleh beberapa orang Pelaksana.

Jumlah Pegawai Pada KPU Kampar Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini tahun 2017 berjumlah 12 orang dan tenaga honorer berjumlah 21 orang.

I. Ketua, Anggota dan Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Membentuk PPK,PPS dan KPPS serta mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan dalam wilayah kerjanya.
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan membuat Berita Acara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilu.
- h. Menumumkan calon anggotaterpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten.
- i. Memeriksa pengaduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS danKPPS.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten.
- k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK,PPS,sekretaris KPU dan Pegawai sekretariat KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan ketentuan perundang-undangan.
- l. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten kepada Masyarakat.
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang yang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

- **Ka.Subag.Umum dan Staf pelaksana Subag.Umum**
 - a. Mengelola dan menyusun rencana subagian umum.
 - b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan,surat menyurat dan ekspedisi.
 - c. Menyusun dan melakukan urusan penomoran ,pengetikan, dan pengadaan naskah dinas.
 - d. Menyusun dan melakukan Urusan perlengkapan
 - e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga.
 - f. Menyusun dan mencatat surat masuk dan surat keluar
 - g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
 - h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas
 - i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas keluar
 - j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis
 - k. Mengumpulkan dan menyusun arsip inaktif
 - l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara
 - m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten.
 - n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten.
 - o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU kabupaten.
 - p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

- **Ka.Subag.Data dan Program dan Staf pelaksana Subag.Data**

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu.
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu.
- c. Menyusun dan melakukan data pemilih
- d. Mengumpulkan dan menyiapk bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait.
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan.
- f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu.
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu.
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervise penyelenggara pemilu
- j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data.
- k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten
- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
- n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten.
- o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU.
- p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

- **Ka.Subag.Logistik dan Staf pelaksana Subag. Logistik**

- a. Mengelola dan menyusun rencana subbagian Logistik
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya
- d. Mengalokasikan barang keperluan pemilu
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagan lain
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

- **Ka.Subag.hukum dan Staf pelaksana Subag.hukum**

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hokum
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual partai politik peserta pemilu
- f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD kabupaten
- h. Menyusun lapporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
- i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta pemilu
- j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta pemilu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu
- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
- n. teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum
- o. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
- p. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU kabupaten
- r. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum
- s. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan

- **Ka.Subag.Keuangan dan Staf pelaksana Keuangan**

- a. Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Member informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjaadi kewenangan KPU Kabupaten
- c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK)
- e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru
- f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
- g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai
- h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
- i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN
- j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- k. Menyusun dan membantu mengawasidan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM
- l. Menyiapkan dan menyusun mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan,serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten
- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten
- p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten
- q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4.2.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**1. Ketua KPU**

Tugasnya:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta tembusannya kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan.

2. Sekretariat

Tugasnya:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;

- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang divisi umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi perkantoran;
- b. Kearsipan;
- c. Protokol dan persidangan;
- d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
- e. Kerumahtanggaan kantor;
- f. Keamanan;
- g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- h. Logistik;
- i. Pengadaan barang dan jasa.

4. Bidang teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pencalonan
- c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
- d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.

5. Bidang devisi perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pemutakhiran data pemilih;
- c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
- d. Pengelolaan jaringan IT ;
- e. Scan hasil pemilu;
- f. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;

6. Bidang devisi hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- a. Pembuatan rancangan keputusan
- b. Verifikasi partai politik;
- c. Verifikasi DPD;
- d. Pelaporan dana kampanye;
- e. Telaah hukum;
- f. Advokasi hukum;
- g. Sangketa pemilu;
- h. Dokumentasi hukum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pengawasan/pengendalian internal.

7. Bidang devisi SDM dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas kredit dengan kebijakan:

- a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
- b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan AdHock;
- c. Diklat dan pengembangan SDM;
- d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
- e. Kampanye;
- f. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
- g. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- h. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar, mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu :

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan juga Warga Masyarakat itu sendiri.

Adapun hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai macam agenda Sosialisasi dan juga Pendidikan Pemilih yang sesuai dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang itu sendiri, akan tetapi segala upaya tersebut terkesan dilaksanakan seadanya saja dan belum terlaksana, hal tersebut dapat dibuktikan dari penelitian dan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat langsung dan mendapatkan hasil bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih masih kurang kemudian kepercayaan masyarakat kepada KPU dan Kandidat pada Pemilihan itu sendiri yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi itu sendiri, selanjutnya upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kami nilai kurang karena pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 pada target pencapaian adalah 75 % akan tetapi pada kenyataannya hanya 57% saja, hal ini juga dibuktikan dari minat, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan tersebut sangat sedikit dan berkurang, peneliti juga tidak memungkiri kenyataan yang ada terjadi pada masyarakat bahwa sikap apatis masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat masih sangat tinggi, akan tetapi apabila diimbangi dengan pendidikan pemilih dalam hal menumbuhkan pemahaman kepada warga tentang pentingnya menggunakan hak pilih tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda pula, peneliti juga dalam hal ini tidak sepenuhnya memberatkan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, ini semua menjadi tanggungjawab bersama, Pemerintah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan rakyat, partai politik, bawaslu dan masyarakat itu sendiri bahkan kandidat yang akan di pilih pada penyelenggaraan pemilihan harus bersinergi dalam pemilihan tersebut demi tercapainya peningkatan tingkat partisipasi dalam demokrasi pemilihan itu sendiri.

2. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada penyelenggaraan pemilihan tersebut dapat kami sebutkan beberapa hal sebagai berikut; pertama, rasa kepercayaan masyarakat kepada kandidat yang akan mereka pilih tidak ada lagi dikarenakan kejenuhan akan janji-janji yang tidak terlaksana yang disampaikan oleh kandidat sebelumnya setelah menjadi pemimpin; kedua, wilayah cangkupan pemilihan yaitu tingkat provinsi menjadi hal yang menyebabkan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat; ketiga, jarak antara pemilih dengan tempat pemilihan yang jauh menyebabkan masyarakat enggan untuk mengeluarkan biaya dan tenaga untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan itu sendiri, keempat rasa ketidakpercayaan membuat apapun pendidikan yang diberikan enggan dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat yang masih sangat tinggi.

6.2 Saran

Dari analisis dan temuan penulis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar penting melakukan beberapa hal sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih harus menggunakan strategi memotivasi dan pengayoman kepada masyarakat, hal tersebut guna membentuk kepribadian masyarakat agar kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada kandidat yang akan mereka pilih dan kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar harus lebih meningkatkan pengawasan bahkan pemantauan langsung ke lapangan akan kinerja petugas penyelenggaraan pemilihan sampai ke tingkat Desa atau Kelurahan, karena tidak setiap petugas penyelenggara tersebut yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar harus lebih giat lagi dalam melakukan strategi dan inovasi dalam menciptakan kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, karena sekarang ini masyarakat lebih tertarik dengan pidato politik dari beberapa partai dari pada pendidikan yang disampaikan KPU Kampar itu sendiri.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, 2011. *Surat An-Nisa' Ayat 58. Al-Jathiyah Ayat 18*.
- Budiarto, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Manik, Husni K, 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI
- Masyhuri, M. Zainuddin, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rivai, Veithzal, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 *Tentang Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Penyelenggaraan Pemilu*.
- Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 *Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.*

Anuar, 2017. *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2013 (Studi Kasus Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis).*

Faizan, M Nur, 2016. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun dalam Mengurangi Angka Golongan Putih (GOLPUT) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 DI Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Karimun).*

Suganda, Fajri, 2017. *Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.*

Jurnal Nugroho, Danar D, 2017. *Konstruksi Pendidikan Demokrasi.* Purwokerto: FKIP UMP

<https://kpu.go.id>

<https://kpu-kampar.go.id>

<https://infopemilu.kpu.go.id>

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/2378/2019

Pekanbaru, 25 Maret 2019 M

Biasa

18 Rajab 1440 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Fadhlul Abrar
NIM. : 11475104989
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : X (Sepuluh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan
Pendidikan Demokrasi Pemilih dan Partisipasi Politik Masyarakat pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018"** Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



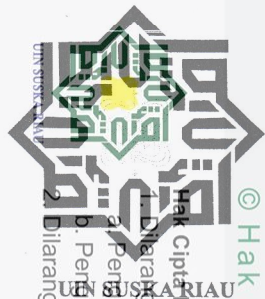
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Normor

Sifat

Lampiran

Perihal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/2379/2019

: Biasa

: -

: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 25 Maret 2019 M

18 Rajab 1440 H

Kepada

Yth. **Rusdi, S. Sos, MA**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Muhammad Fadhlul Abrar

NIM : 11475104989

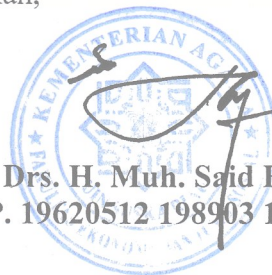
Jurusan : Administrasi Negara

Semester : X (Sepuluh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Pendidikan Demokrasi Pemilih dan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/20872
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : UIN/01/FVII/PP.20.9/2378/2019 Tanggal 25 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD FADHLUL ABRAR**
2. NIM/KTP : **11475104989**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI PEMILIH DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**
7. Lokasi Penelitian : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Saeelamand University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/255

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/20872 tanggal 28 Maret 2019, dengan ini Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	:	MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
2. NIM	:	11475104989
3. Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang	:	S1
6. Alamat	:	PEKANBARU
7. Judul Penelitian	:	PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI PEMILIH DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
8. Lokasi	:	1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR 2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPTEN KAMPAR 3. PPK KECAMATAN KUOK, SALO, BANGKINANG 4. DPRD KABUPATEN KAMPAR 5. PARTAI PKS 6. PARTAI NASDEM 7. PARTAI GOLKAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 01 April 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi Kesatuan Bangsa



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 321/ PP.09.3-Kt /1401/KPU-Kab/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kampar menerangkan :

Nama : MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
NIM : 11475104989
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUSKA RIAU
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN
DEMOKRASI PEMILIH DAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**
Lokasi : KPU KABUPATEN KAMPAR

Telah melakukan penelitian/pengumpulan data untuk bahan skripsi pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bangkinang Kota , 22 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR



AHMAD DAHLAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

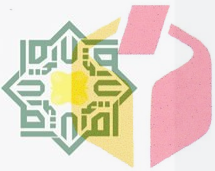
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengutip dan mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Himpunan Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT KETERANGAN
Nomor : 05/ /RI-04/TU.01.02/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: Yarno Arsyid, SE, M.Si
: 19761104 200901 1 001
: Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar
: Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

: Muhammad Fadhlul Abrar
: 11475104989
: Administrasi Negara
: 2019

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Bawaslu Kabupaten Kampar, pada tanggal 16 Oktober 2019, dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul:

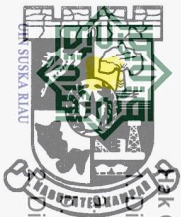
“Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Pendidikan Demokrasi Pemilih dan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018”

Demikian keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Bangkinang Kota, 28 Oktober 2019



Koordinator Sekretariat,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Yarno Arsyid



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

SEKRETARIAT DPRD

JALAN LINGKAR (STA. 7 + 800) TELP. / FAX. (0762) 7320097
BANGKINANG KOTA

Kode Pos 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / SETWAN - KP / 923

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD FADHLUL ABRAR**
NIM : 11475104989
Universitas : **UIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
Jenjang : **S 1**
Alamat : **Pekanbaru**
Judul Penelitian : **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI PEMILIH DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.**
Lokasi : **DPRD Kabupaten Kampar**

Telah melakukan penelitian / pengumpulan data untuk bahan skripsi pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 18 November 2019

An. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAMPAR

Kepala Bagian Umum


SABARUDDIN, S.Sos
NIP. 19630812 198803 1 007



SURAT KETERANGAN
Nomor : 86/K/AD-04-PKS/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, menerangkan bahwa :

: MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
: 11475104989
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
: S1
: PEKANBARU
: **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
PEMILIH DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2018**
: DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN
KAMPAR

Telah melakukan penelitian/pengumpulan data untuk bahan skripsi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang Kota, 12 November 2019

Dewan Pengurus Daerah

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kampar



SELAMAT
Sekretaris Umum

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN KAMPAR

Markaz Dakwah : Jl. Jend. Sudirman Komplek TTB Bangkinang CP : 085356693811/081365730052

Email : pkskamparriau.04@gmail.com

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis berdasarkan atau dengan memanfaatkan sebagian atau keseluruhan isi dari publikasi ilmiah, tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN KAMPAR**

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-65./GOLKAR-K/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
 NIM : 11475104989
 Unuiversitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Judul Penelitian : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI PEMILIH DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
 Lokasi : DPD PARTAI GOLKAR KAB. KAMPAR.

Telah melakukan penelitian / pengumpulan data untuk bahan skripsi pada DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN KAMPAR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang , 12 November 20189

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAMPAR


SYAFRIADI
 Sekretaris



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 59/SKET/DPD-NasDemKampar/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Kampar, menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FADHLUL ABRAR
 NIM : 11475104989
 Nama Kampus : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI PEMILIH DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
 Lokasi : DPD PARTAI NasDem KABUPATEN KAMPAR

Telah melakukan penelitian/pengumpulan data untuk bahan skripsi pada DPD Partai NasDem Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 13 November 2019

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI NASDEM KABUPATEN KAMPAR



SYAMSUL MUHKAMAR, S.Ag
Ketua



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan.
15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
16. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
17. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
18. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
20. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.
23. Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil Penyelenggaraan Pemilu.
24. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
25. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.
26. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
27. Survei atau Jajak Pendapat Pemilu adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu, Peserta Pemilu, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
28. Penghitungan Cepat Hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
29. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
30. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Komisi ini, mencakup Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan:

- a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemilu anggota DPD.

Pasal 4

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

BAB II

SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Sasaran Sosialisasi Pemilu

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:
- a. Pemilih yang berbasis:
 1. keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. kaum marginal;
 8. komunitas;
 9. keagamaan;
 10. relawan demokrasi; dan
 11. warga internet (*netizen*);
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pasal 6

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN, petugas pemutakhiran data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
- (3) PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Materi Sosialisasi Pemilu

Pasal 7

Materi Sosialisasi Pemilu mencakup:

- a. seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
 1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 3. pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
 4. penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
 5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 7. kampanye dan dana kampanye Pemilu;
 8. pemungutan dan penghitungan suara;
 9. penetapan hasil Pemilu; dan
 10. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- b. materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 8

- (1) Materi sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi:
 - a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. jumlah dan alokasi anggaran Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. jumlah dan jenis peraturan Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. tata cara penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - e. Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, meliputi:
 - a. konsep dasar tentang hak memilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - d. penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar Pemilih;
 - f. jenis-jenis daftar Pemilih; dan
 - g. peran serta masyarakat, Partai Politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- (3) Materi sosialisasi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3, meliputi:
- a. persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu;
 - b. tahapan dan jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
 - c. mekanisme pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- (4) Materi sosialisasi penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4 meliputi:
- a. tahapan dan jadwal penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu;
 - b. mekanisme penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu; dan
 - c. nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu.
- (5) Materi sosialisasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5 meliputi:
- a. prinsip penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR;
 - c. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi;
 - d. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD;
 - f. tahapan dan jadwal penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. mekanisme penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - i. ketentuan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan pada daerah induk dan daerah pemekaran.
- (6) Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 6 meliputi:
- a. tahapan dan jadwal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;
 - d. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. mekanisme verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - h. penyusunan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - i. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - j. persyaratan calon anggota DPD;
 - k. tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD;
 - l. mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD;
 - m. penetapan daftar calon sementara anggota DPD;
 - n. penetapan daftar calon tetap anggota DPD; dan
 - o. peran serta masyarakat pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (7) Materi sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 7 meliputi:
 - a. ketentuan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jadwal kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. visi, misi dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. ketentuan dana kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. jenis-jenis laporan dana kampanye;
 - f. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - g. penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - h. audit dan hasil audit laporan dana kampanye.
- (8) Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a angka 8 dan angka 9 meliputi:
 - a. tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
 - c. tata cara penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - e. tata cara penetapan calon terpilih anggota DPD.

Bagian Ketiga Metode Sosialisasi

Pasal 9

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui:

- a. forum warga;
- b. komunikasi tatap muka;
- c. media massa;
- d. bahan sosialisasi;
- e. alat peraga sosialisasi;
- f. Mobilisasi Sosial;
- g. pemanfaatan budaya populer;
- h. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- i. laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- k. media sosial;
- l. media kreasi; dan/atau
- m. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Pasal 10

Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

- a. diskusi;
- b. seminar;
- c. lokakarya (*workshop*);
- d. rapat kerja;
- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi;
- h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
- i. metode tatap muka lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, meliputi:
 1. radio;
 2. televisi; dan/atau
 3. media dalam jaringan (*online*).
- (2) Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.

Pasal 12

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e, terdiri atas:

- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 1. brosur;
 2. selebaran (*leaflet*);
 3. pamflet;
 4. buku kecil (*booklet*);
 5. poster;
 6. folder; dan/atau
 7. stiker.
- b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 1. spanduk;
 2. pataka (*banner*);
 3. baliho;
 4. reklame (*billboard*)/reklame elektronik (*videotron*); dan/atau
 5. umbul-umbul.
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

Pasal 13

Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k yaitu media sosialisasi yang dihasilkan melalui karya seni, meliputi:

- a. film;
- b. seni musik;
- c. seni tari;
- d. seni lukis;
- e. sastra; dan/atau
- f. seni peran.

Pasal 14

- (1) Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Pendidikan Pemilih

Pasal 15

- (1) Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - g. kaum marjinal;
 - h. komunitas;
 - i. keagamaan;
 - j. relawan demokrasi; dan/atau
 - k. warga internet (*netizen*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi Sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
- (3) Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. instansi pemerintah;
 - g. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - h. media massa cetak dan elektronik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu

Pasal 16

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu;
- b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 17

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Pasal 20

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilu;
 - c. Sosialisasi Pemilu;
 - d. Pendidikan Pemilih; dan
 - e. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paragraf 1

Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pasal 21

Keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
- b. keterlibatan dalam tahapan Pemilu; dan/atau
- c. keterlibatan dalam evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 22

Keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menjadi petugas Penyelenggara Pemilu;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari Peserta Pemilu.

Pasal 24

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa:

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan hasil evaluasi.

Paragraf 2

Sosialisasi Pemilu

Pasal 25

- (1) Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tujuan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilu; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilu.
- (3) Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pendidikan Pemilih

Pasal 26

- (1) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan Pemilih;
 - b. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- (3) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemilih penyandang disabilitas;
- e. Pemilih berkebutuhan khusus;
- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

- (4) Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e.
- (2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilu;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilu seperti Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.

Pasal 28

- (1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.
- (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
 - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
 - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
- (2) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Pasal 30

- (1) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. metodologi yang digunakan; dan
- g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

- (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU.

Pasal 31

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

Pasal 32

- (1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU.
- (2) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 33

- (1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
- (2) Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 34

- (1) KPU memberikan sanksi kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (3) Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, dikenai sanksi sesuai Undang-Undang tentang Pemilu.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1582), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 193

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar -Ahmad Dahlan



2. Sekretaris Umum KPU Kabupaten Kampar -Syafrizal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kampar
-Marhaliman**



**4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
-Muhammad Faisal**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
-Tamarudin**



**6. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
-Samsul Muhkamar**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) -Syafriadi



8. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuok -Iffa Abdurrahman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**9. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Salo
-Annisa Sholehah**



**10. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang
-Muhammad Abrar**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Muhammad Fadhlul Abrar**, lahir di Merangin pada tanggal 23 Januari 1996. Anak ketiga dari tiga orang bersaudara yaitu dari pasangan ayahanda Khaidir dan ibunda Roaini. Pendidikan yang ditempuh penulis SD 008 Silam, lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Model Kuok, lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bangkinang, lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada September 2014 - Desember 2019. Atas berkat rahmat serta karunia dari Allah SWT, penulis telah melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang)”**. *alhamdulillah*, akhirnya pada tanggal 20 Desember 2019, penulis telah mempertahankan skripsi di depan dewan penguji dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).